

BAB I

PENDAHULUAN

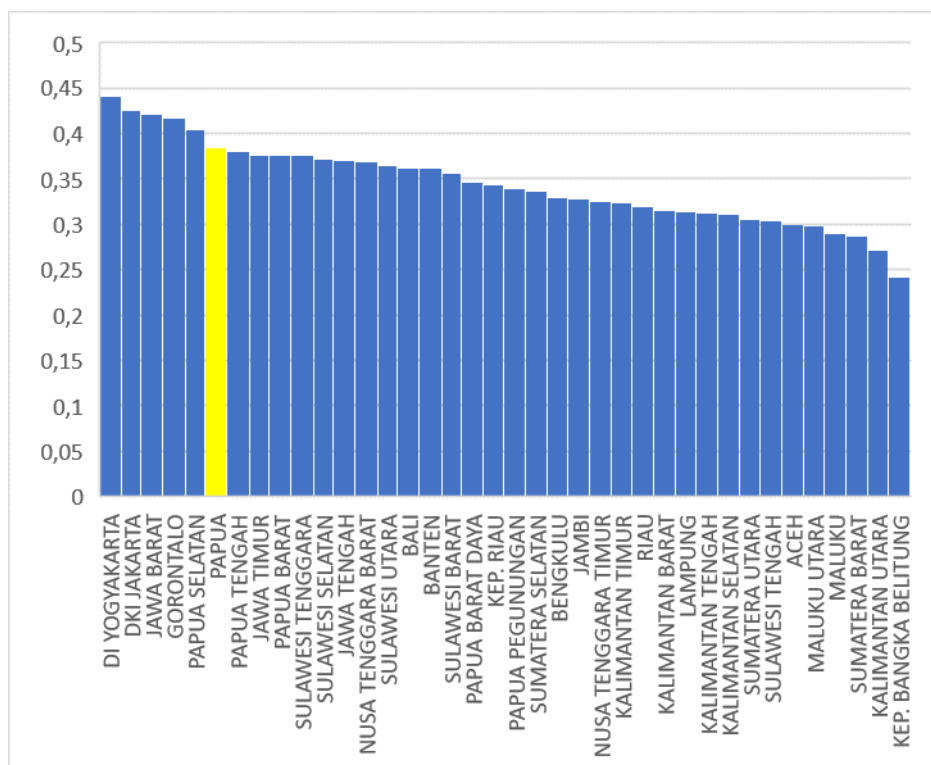
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi seringkali menjadi salah satu ukuran utama untuk menggambarkan kondisi dan dinamika perekonomian suatu wilayah. Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui proses pembangunan, suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan penduduknya (Putri, 2024).

Menurut Tambunan, keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui laju pertumbuhan ekonominya (Rahayu & Febriaty, 2024). Oleh karena itu, setiap daerah berupaya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi syarat penting bagi keberlangsungan pembangunan tersebut (Jati & Purnomo, 2023).

Meskipun demikian, pemerataan menjadi kunci penting agar pembangunan tidak hanya menciptakan peningkatan angka ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga dari perubahan struktur ekonomi dan menurunkannya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antarwilayah, serta antar sektor ekonomi (Caesarisma & Hamrullah, 2023).

Isu ketimpangan pendapatan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi dan sudah menjadi masalah yang sering dibahas oleh para peneliti dan ekonom dikarenakan berkaitan dan memberikan dampak terhadap indikator pembangunan lainnya. Menurut Suryani & Woyanti (2021) ketimpangan pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima berbeda antar individu, sehingga perbedaan antar individu semakin melebar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ketimpangan pendapatan terjadi ketika tingkat pendapatan tidak merata di antara individu. Berdasarkan uraian tersebut, ketimpangan pendapatan dapat dilihat berdasarkan nilai gini ratio. Gini ratio di Indonesia dapat dilihat pada grafik rata-rata gini ratio periode 2022-2024 di bawah ini:



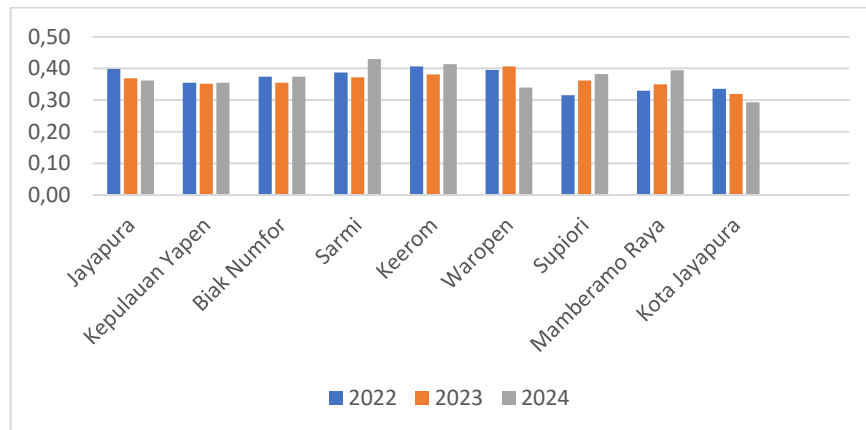
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 2025

Gambar 1.1 Rata-rata Gini Ratio Indonesia Tahun 2022-2024

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat rata-rata gini ratio di Indonesia selama periode 2022-2024. Dapat dilihat bahwa provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang tingkat ketimpangan pendapatannya paling tinggi dengan berada pada urutan ke-6 di Indonesia setelah provinsi D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Papua Selatan pada tahun 2022-2024. Ketimpangan pendapatan provinsi Papua tercermin dalam nilai gini ratio sebesar 0,362 pada tahun 2024 yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan di provinsi Papua tidak merata.

Distribusi pendapatan yang tidak merata seperti provinsi Papua disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan politik. Provinsi seperti Jawa Tengah atau Bali memiliki ekonomi yang lebih beragam dan padat karya meliputi sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata sehingga mampu menciptakan lapangan kerja luas dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Sebaliknya, perekonomian Papua masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang padat modal dan hanya melibatkan sedikit tenaga kerja lokal. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap infrastruktur di sebagian besar wilayah juga memperlambat pemerataan pembangunan. Faktor-faktor ini membuat upaya pemerataan pendapatan sulit tercapai meskipun ekonomi daerah tumbuh sehingga terjadi ketimpangan (Purnama et al., 2024).

Ketimpangan tidak hanya terlihat antar provinsi, tetapi juga tercermin pada perbedaan gini ratio antar kabupaten/kota di Papua yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 2025

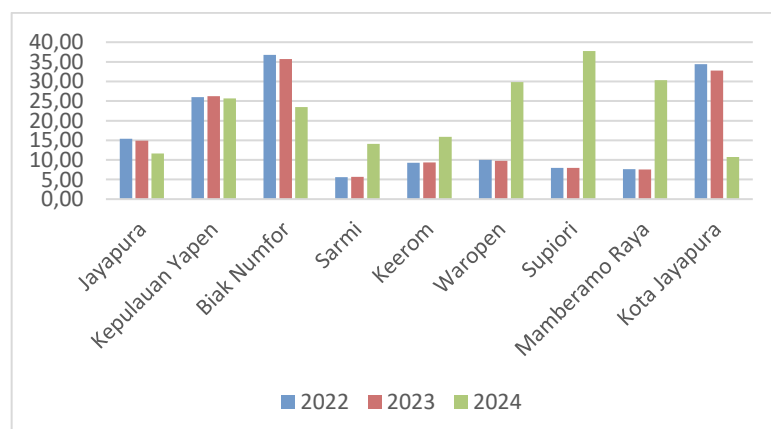
Gambar 1.2 Gini Ratio Papua 2022-2024

Berdasarkan gambar 1.2, nilai gini ratio Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 sebesar 0,430 yang mengalami peningkatan sebesar 0,058 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,372, yang menggambarkan bahwa terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kota Jayapura merupakan daerah yang distribusi pendapatannya paling merata dengan gini ratio tahun 2024 sebesar 0,293. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan menurun sebesar 0,027 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,320 dan menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Ketidakmerataan terjadi karena tingginya konsentrasi pembangunan ekonomi di wilayah pusat seperti kota Jayapura, yang menawarkan akses yang lebih baik terhadap ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik. Sementara itu, daerah-daerah yang terisolasi di Papua, seperti Pegunungan Tengah, mengalami kendala dalam akses transportasi, pendidikan, dan kesempatan kerja, yang menghalangi distribusi pendapatan secara adil. Walaupun pemerintah telah berusaha mengatasi ketimpangan melalui berbagai program pembangunan dan pelaksanaan akses yang lebih merata, kondisi struktural dan geografis juga menghambat pemerintah untuk

mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua golongan masyarakat (Putri, 2024).

Ketimpangan pendapatan selalu berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya, di satu sisi ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat menyebabkan lebih banyak masyarakat wilayahnya yang mengalami kondisi kemiskinan. Sedangkan di sisi lain kemiskinan yang semakin meningkat di suatu wilayah dapat memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Maurilla et al., 2023). Kemiskinan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, orang-orang yang berada dalam kemiskinan tentunya memiliki kesulitan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara orang-orang yang berpendapatan tinggi terus memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga terjadi perbedaan pendapatan di masyarakat (Anfa & Bintariningtyas, 2024). Perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan tinggi di provinsi Papua selama periode 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 2025

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Papua Tahun 2022-2024 (Ribu Jiwa)

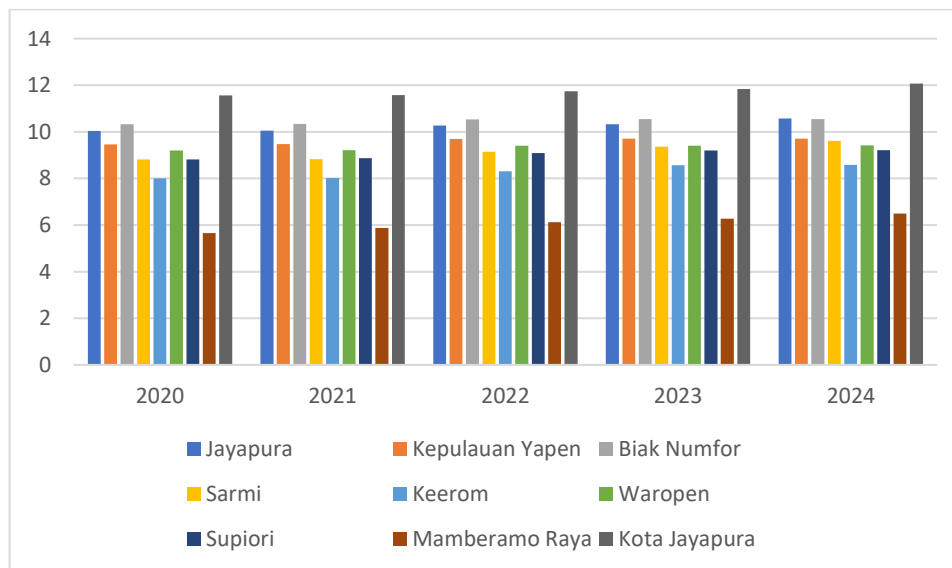
Berdasarkan gambar 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa Supiori merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Papua. Pada tahun 2024, penduduk miskin kabupaten Supiori mencapai sebanyak 37,72 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin kota Jayapura hanya sebesar 10,72 ribu jiwa pada tahun yang sama. Hal tersebut membuktikan bahwa perbedaan jumlah penduduk miskin antar daerah menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah pula meskipun telah terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

Hasil temuan yang dilakukan oleh Arkum dan Amar (2022) menyatakan bahwa apabila kemiskinan meningkat maka dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami peningkatan. Kemiskinan menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan setiap individu. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan minimum adalah penyebab kemiskinan, dan penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Karena pendapatan mereka terus meningkat maka kebutuhan minimum semakin terpenuhi. Ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan apabila pendapatan masyarakat meningkat (Hindun et al., 2019).

Sedangkan menurut Muslinawati & Sutrisno (2024), Kemiskinan memberikan dampak positif namun tidak signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan karena bertambahnya jumlah individu dalam keadaan miskin tidak selalu menyebabkan perubahan besar dalam distribusi pendapatan secara keseluruhan. Situasi ini bisa terjadi apabila kelompok masyarakat yang miskin memiliki tingkat pendapatan yang cukup seragam dan tidak mengalami perubahan

yang drastis, sehingga perubahan tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi rasio ketidakmerataan.

Selain kemiskinan, para peneliti juga menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam menentukan ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Khairunnisa et al., 2025). Kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas tenaga kerja tidak optimal dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi menjadi terbatas (Rahayu & Febriaty, 2024). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan lamanya masa sekolah yang dialami oleh penduduk 25 tahun ke atas (BPS 2024). Fenomena tersebut tercermin pada grafik di bawah ini, yang menunjukkan bagaimana perbedaan rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota di provinsi Papua selama periode 2022-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 2025

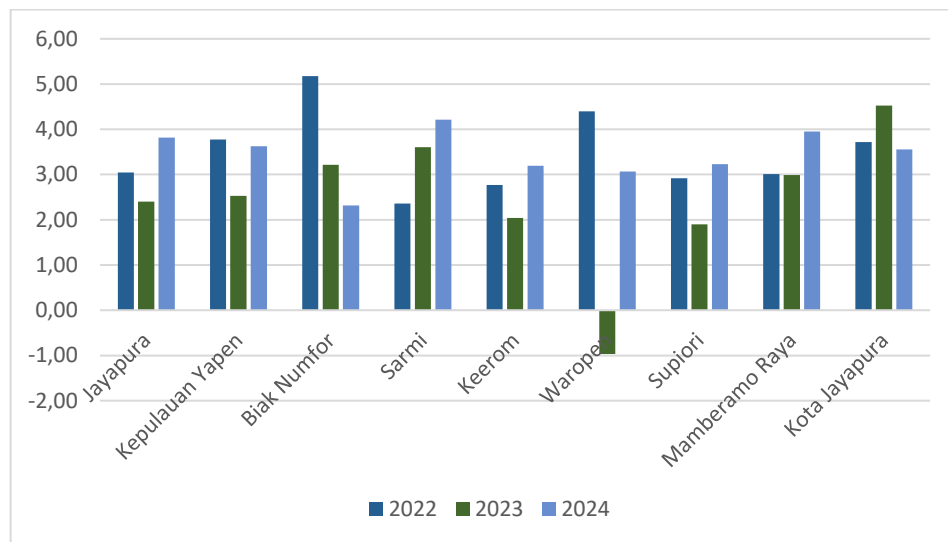
Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022-2024 (Tahun)

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, kabupaten Mamberamo raya merupakan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang paling rendah di provinsi Papua pada tahun 2024 dengan rata-rata menempuh pendidikan selama 6,49 tahun. Di sisi lain, kota Jayapura berada pada posisi yang paling tinggi dengan rata-rata menempuh pendidikan selama 6,49 tahun pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sumber daya manusia masih mengalami kesenjangan yang tinggi antar wilayahnya sehingga dapat memperlebar ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil yang penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa et al., 2025) pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan naiknya tingkat pendidikan maka ketimpangan pendapatan akan berkurang. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktasari & Suradi (2025), yang menyatakan bahwa meningkatnya rata-rata lama sekolah berpengaruh justru memperlebar ketimpangan pendapatan. Pendidikan di daerah perkotaan cenderung mengalami peningkatan karena mempunyai akses yang lebih mudah, sedangkan kelompok miskin dan wilayah terpencil terhambat untuk mengakses pendidikan. Manfaat pendidikan menjadi tidak merata sehingga memperlebar ketimpangan pendapatan.

Indikator lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat mengukur pembangunan ekonomi suatu wilayah (Febriyani & Anis, 2021). Simon Kuznets (1955) menyatakan hubungan antara pertumbuhan dan tingkat ketimpangan yang digambarkan dalam Hipotesis Kuznets "U Terbalik". Pada tahap awal

pembangunan tentunya masih sebagian besar penduduknya berada pada garis kemiskinan, sementara sebagian kecil sudah mulai mendapatkan hasil dari industrialisasi atau pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Setelah pembangunan dilakukan lebih lanjut maka distribusi pendapatan akan membaik sehingga menurunkan ketimpangan pendapatan (Andriana & Imaningsih, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua selama periode 2022-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah 2025

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Papua Tahun 2022-2024 (Persen)

Dapat dilihat pada gambar 1.5 diatas bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di provinsi Papua adalah kabupaten Sarmi yaitu sebesar 4,21% pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, kabupaten Biak Numfor menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah di Papua dengan

pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,31% yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Caesarisma & Hamrullah (2023), meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kabupaten kota yang tertinggal memiliki akses yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan daerah yang maju atau lebih dekat dengan pusat pertumbuhan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar sehingga ketimpangan semakin melebar. Di sisi lain, hasil temuan yang dilakukan oleh (Irawan et al., 2024) menyatakan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan tetapi pengaruhnya sangat rendah. Artinya ekonomi mengalami pertumbuhan tetapi tidak merata. Walaupun pemerintah telah berupaya mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jurang ekonomi antarwilayah di provinsi Papua tetap melebar.

Provinsi Papua menunjukkan tren yang positif pada rata-rata lama sekolah, yang ditandai dengan kenaikan setiap tahunnya. Selain itu, jumlah penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sementara pertumbuhan ekonomi relatif meningkat meskipun terdapat variasi antardaerah. Secara teori, kombinasi dari kenaikan rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi serta penurunan jumlah penduduk miskin seharusnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Namun, kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi Papua masih sangat tinggi. Berdasarkan fenomena dan uraian permasalahan di atas, muncul pertanyaan mendalam tentang seberapa besar

peran kemiskinan, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi dalam membentuk ketimpangan yang ada di provinsi Papua pada tahun 2020-2024. Sehingga judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah **“Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Pengaruh Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2020-2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Papua pada tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Papua pada tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Papua pada tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap

ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi Papua pada tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Di bawah ini merupakan manfaat dari penelitian Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Pengaruh Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2020-2024.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan bagi penulis terkait permasalahan penelitian yang diteliti yaitu adalah Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Pengaruh Kemiskinan, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2020-2024.

2. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan informasi untuk para mahasiswa dan pihak lainnya di lingkungan Universitas Siliwangi, khususnya di lingkungan fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya mengenai ketimpangan pendapatan (*Income Inequality*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai tambahan kajian dan informasi bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi Papua.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dan kebijakan khususnya pemerintah provinsi Papua dalam mengambil keputusan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di provinsi Papua dengan data yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Papua. Website tersebut menyajikan data yang valid untuk mendukung penelitian mengenai ketimpangan pendapatan di provinsi Papua.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2025, yang diawali dengan pengajuan judul dan pembimbing. Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

